

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Dalam konteks seperti ini, maka penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk menunjang aspirasi perjuangan rakyat dengan mengutamakan aspek keserasian dan aspek pendemokrasian.

Salah satu syarat agar suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonomi adalah tersedianya sumber-sumber keuangan tersendiri sehingga mampu membiayai rumah tangganya sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa suatu daerah yang berstatus otonom, masalah keuangan mempunyai peranan yang sangat penting. Semakin banyak dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan tugas dan fungsi pemerintah, maka tidak kalah pentingnya faktor-faktor pengendalian manajemen yang profesional dalam penggunaan anggaran daerah oleh aparatur di wilayah/daerah atau dalam unit-unit kerja instansi daerah yang melaksanakan tugas tersebut.

Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut daerah otonom telah diberikan kewenangan sepenuhnya oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus pembangunan daerah berdasarkan kepentingan dan aspirasi masyarakat termasuk halnya BPKAD sebagai salah satu instansi pemerintah daerah di Kabupaten

Pohuwato yang diperhadapkan dengan masalah penganggaran yang menjadi salah satu unsur pokok pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan aparat daerah yang tanggap dan sanggup mengelola sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan daerah sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

BPKAD Kabupaten Pohuwato sebagai salah satu instansi pada pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato mendayagunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang handal, efektif dan profesional.

Pengendalian manajemen merupakan upaya yang dilakukan dengan memusatkan pada fungsi-fungsi manajemen yang tepat, artinya fungsi-fungsi manajemen benar-benar diimplementasikan serta dimaksimalkan. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang dimaksud adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Penerapan sistem pengendalian manajemen menurut Supriyono, (2000: 36) terdapat unsur-unsur yang terbagi dalam kelompok struktur dan proses. Adapun yang termasuk dalam kelompok struktur yaitu struktur organisasi, aliran informasi dan pendelegasian wewenang. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok proses adalah penyusunan anggaran, pelaporan dan analisis.

Dalam konteks belanja daerah, pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja secara adil dan merata serta secara relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan

umum serta diharapkan agar penggunaan anggaran secara keseluruhan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat sehingga untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah maka pengendalian manajemen terhadap anggaran belanja perlu diperhatikan kejelasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang hendak dicapai.

Selain dihadapkan dengan masalah anggaran untuk kebutuhan pembelanjaan daerah, BPKAD Kabupaten Pohuwato juga dituntut untuk mampu mengoptimalkan pendapatan yang ada untuk membiayai proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka sangat dibutuhkan pengendalian manajemen berupa perencanaan anggaran yang teratur dan terarah dari aparat yang berwenang sehingga setiap penggunaan dana sekecil apapun dapat memberikan hasil yang optimal.

Untuk mengelola anggaran secara efektif, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan tolok ukur yaitu, catatan masa lalu, rencana masa depan, mekanisme pengalokasian sumber daya, metode untuk pertumbuhan, alat penyaluran pendapatan, mekanisme untuk negosiasi, harapan, aspirasi, strategi organisasi, satu bentuk kekuatan kontrol dan alat atau jaringan komunikasi. Berdasarkan teori dari Suadi (2011) faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran diantaranya adalah faktor perilaku manajer yang ditunjukkan dengan kapasitas individu seorang manajer dalam melaksanakan sistem pengendalian manajemen, partisipasi dalam penyusunan anggaran, kesulitan sasaran anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran dan kejelasan sasaran anggaran.

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Munawar (2009) dalam tesis yang berjudul Pengaruh Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja, membuktikan bahwa pengendalian manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur'ain (2011), yang juga membuktikan bahwa sistem pengendalian manajemen berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan anggaran belanja daerah.

Dengan memperhatikan pentingnya pengendalian manajemen terhadap penggunaan anggaran sehingga pemerintah daerah dapat menjamin kelancaran tugas sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan administrator sosial kemasyarakatan, maka anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan transparan. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam hal ini para pegawai yang dalam lingkungan BPKAD Kabupaten Pohuwato dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab penggunaan anggaran daerah dalam setiap unit dimana mereka berada terutama yang memiliki tanggung jawab langsung dalam penggunaan anggaran daerah yakni bagian keuangan pada setiap unit atau bagian pada BPKAD Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2011 BPK Masih menemukan 4 kasus adanya kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (Studi Penelitian pada BPKAD Kabupaten Pohuwato). Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Nur'ain (2011)

dan Ririn (2011) mengenai sistem pengendalian manajemen dan efektivitas penggunaan anggaran belanja daerah. Namun, penelitian ini dilakukan pada instansi lain yang juga berada di Kabupaten Pohuwato yaitu BPKAD.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian manajemen berupa struktur pengendalian manajemen secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran belanja daerah Kabupaten Pohuwato?
2. Apakah sistem pengendalian manajemen berupa proses pengendalian manajemen secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran belanja daerah Kabupaten Pohuwato?
3. Apakah sistem pengendalian manajemen berupa struktur dan proses pengendalian manajemen secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran belanja daerah Kabupaten Pohuwato?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian manajemen berupa struktur pengendalian manajemen secara parsial terhadap efektivitas penggunaan anggaran belanja daerah di BPKAD Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian manajemen berupa proses pengendalian manajemen secara parsial terhadap efektivitas penggunaan anggaran belanja daerah di BPKAD Kabupaten Pohuwato.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian manajemen berupa struktur dan proses pengendalian manajemen secara simultan terhadap efektivitas penggunaan anggaran belanja daerah di BPKAD Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan literatur sistem pengendalian manajemen dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian lain terutama yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen di sektor publik.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap BPKAD Kabupaten Pohuwato dalam hal pengendalian manajemen dan efektivitas penggunaan anggaran belanja daerah.